

SIARAN PERS BERSAMA

No. 25 /34 /DKom
SP-12/KLI/2023

Rangkaian Pertemuan *Task Force* dan *Working Group* Deputi Menteri Keuangan dan Bank Sentral Awali Keketuaan ASEAN 2023 pada Jalur Keuangan

Bali, 10 Februari 2023 – Sebagai bagian dari Keketuaan Indonesia dalam ASEAN 2023, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan telah melaksanakan rangkaian pertemuan Jalur Keuangan yang dimulai dengan ASEAN+3 Task Force (TF) Meeting pada tanggal 2-3 Februari 2023 lalu di Bali. Pertemuan dilanjutkan dengan rangkaian *ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting - Working Group* (AFCDM-WG) pada tanggal 6-10 Februari 2023 yang juga diadakan di Nusa Dua, Bali. Pertemuan membahas perkembangan *ASEAN Blueprint 2025* yang direfleksikan dalam berbagai agenda komite kerja (*working committee*) di sektor keuangan ASEAN pada tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023. Pertemuan AFCDM-WG sendiri merupakan pertemuan pleno level teknis membahas hasil-hasil pertemuan komite kerja sebelumnya dan berbagai agenda kerjasama sektor keuangan ASEAN, termasuk pembahasan *Priority Economic Deliverables* (PED) usulan Indonesia.

Pertemuan pleno AFCDM-WG dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Febrio Nathan Kacaribu. Dalam sambutan pembukaannya, Dody Budi Waluyo menyampaikan pentingnya bagi ASEAN untuk melanjutkan proses yang telah ada berdampak pada ekonomi ASEAN, sekaligus terbuka dan dapat beradaptasi dengan perubahan untuk menyambut masa depan dan menghadapi tantangan. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan Indonesia pada ASEAN, Indonesia akan bekerja sama dengan semua anggota ASEAN untuk melakukan reviu proses jalur keuangan ASEAN untuk memastikan ASEAN dapat merespon terhadap berbagai perubahan dan tantangan. Dalam kesempatan yang sama, Febrio menyampaikan bahwa kerja sama keuangan di kawasan ASEAN perlu dikelola secara hati-hati. Febrio juga menyampaikan bahwa tiga PED sangat bermanfaat untuk wilayah ASEAN dan harus menjadi output konkrit pada pertemuan ini. Fokus partikular dari PED tersebut adalah kesiapan kesehatan, infrastruktur keuangan, perpajakan internasional, digitalisasi finansial yang inklusif untuk UMKM dan keuangan berkelanjutan. Lima agenda ini akan memperkuat kerja sama dan integrasi keuangan ASEAN di dalam *blue print 2025* dan membantu Asia Tenggara dalam merespons tantangan global dan memastikan pemulihan ekonomi bersama.

Keketuaan Indonesia pada ASEAN 2023 melanjutkan kesuksesan Presidensi G20 pada tahun 2022. Indonesia kembali mengambil peran kepemimpinan di level kawasan dengan memegang Keketuaan pada ASEAN (ASEAN Chairmanship) dan ASEAN+3 (ASEAN+3 Co-Chairmanship). Tema yang diangkat oleh Indonesia adalah “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” melanjutkan tema besar sebelumnya yang didorong oleh Presidensi G20 “*Recover Together Recover Stronger*”. Keketuaan Indonesia diharapkan dapat mendorong ASEAN untuk berperan aktif, menawarkan ide dan solusi untuk memperkuat pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang berkelanjutan.

Terdapat tiga *strategic thrust* yang menaungi *Priority Economic Deliverables* (PEDs) pada Keketuaan Indonesia di jalur keuangan. Pertama, *recovery rebuilding*, dengan PED mendorong pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN. Kedua, *digital economy* dengan PED memajukan konektivitas pembayaran dan mempromosikan literasi dan inklusi keuangan digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketiga, *sustainability* dengan PED mempromosikan keuangan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau. Berbagai program dalam PED tersebut dibahas melalui 10 pertemuan komite kerja (*Working Committes*) yang diampu oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hasil rangkaian pertemuan tersebut akan dilaporkan dan dibahas dalam pertemuan AFCDM-*Working Group*.

Terkait pilar *recovery-rebuilding*, pertemuan *Working Committee on Capital Account Liberalization* membahas eksplorasi pedoman terkait *ASEAN Local Currency Settlement Framework* untuk mendukung upaya mempromosikan *Local Currency Transaction* serta upaya lainnya yang perlu dilakukan ASEAN untuk menjawab dinamika ekonomi dan keuangan saat ini. Pertemuan *Working Committee on ASEAN Banking Integration Framework* (ABIF) membahas keberlanjutan *ABIF Guideline to incorporate Digitalization* menuju integrasi perbankan ASEAN di era digital. Lebih lanjut, *Working Committee on Financial Services Liberalization* membahas agenda perkembangan isu liberalisasi keuangan di bawah *ASEAN Framework Agreement on Services* (AFAS) dan *Free Trade Agreements*, termasuk Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-Kanada.

Isu kebencanaan juga dibahas pada ASEAN *Cross-Sectoral Coordination Committee on Disaster Risk Financing and Insurance* (ACSCC-DRFI). Mengingat Indonesia dan kawasan ASEAN sangat rawan akan bencana alam, pertemuan membahas Pendanaan Risiko Bencana Terdapat inisiatif yang diusung sejak keketuaan Brunei untuk memperluas cakupan dari pertemuan ini dan memasukkan risiko kesehatan ke dalam pertemuan ini. Pada pertemuan tersebut juga dilakukan pergantian ketua dari Kamboja ke Indonesia. Lebih lanjut, Kementerian Keuangan juga bekerja sama dengan Pemerintah Inggris mengadakan seminar bertajuk “Strengthening Food Security in ASEAN” sejalan dengan meningkatnya tantangan global terkait kerawanan pangan dan krisis pupuk. ASEAN perlu membentuk sistem kerja sama, kolaborasi, dan koordinasi untuk mendorong keterjangkauan pangan bagi semua.

Terkait pilar digitalisasi, pertemuan *Working Committee Payments and Settlements Systems* dibahas mengenai keberlanjutan diskusi ASEAN *Payment Connectivity*, termasuk perluasan keanggotaan dan pembahasan QR-based connectivity. Pertemuan juga membahas perihal implementasi peta jalan G20 untuk memajukan pembayaran antar negara. Sementara itu, *Working Committee on Financial Inclusion* membahas berbagai capaian dan program kerja ke depan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan digital, antara lain dengan pembuatan Pedoman Pelaksanaan Penguatan Literasi Keuangan Digital yang dapat menjadi rujukan bagi negara anggota ASEAN.

Terkait pilar *sustainability*, pembiayaan transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan dan ekonomi hijau yang dibahas dalam pertemuan *WC Capital Market Development* serta *Joint ASEAN Capital Market Forum (ACMF) - WC-Capital Market Development*. Pertemuan pleno AFCMD-WG juga didahului oleh penyelenggaraan seminar *Energy Transition Mechanism (ETM)* dan *Food Security*. Kementerian Keuangan bekerja sama dengan ADB menyelenggarakan seminar “Aligning Energy Transition with Economic Development” yang membahas pentingnya transisi energi bagi Negara anggota ASEAN.

Tindak lanjut pembahasan agenda pada rangkaian pertemuan kali ini akan dilaporkan dan dimintakan arahan pada pertemuan level deputi keuangan dan bank sentral ASEAN (*ASEAN Finance and Central Bank Deputies Meeting/AFMGM*) di akhir Maret mendatang. Kerja sama lintas sektoral pada pilar ekonomi ASEAN, termasuk proposal PED Indonesia diharapkan mampu memperkuat proses kerja sama ekonomi dan keuangan dalam mendorong proses pemulihan dan ketahanan ekonomi kawasan ASEAN dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ke depan.

Narahubung Media:

Erwin Haryono
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
☎ 021-131

✉ bicara@bi.go.id

 BankIndonesiaOfficial

 bank_indonesia

 bank_indonesia

 BankIndonesiaChannel

Rahayu Puspasari
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan
Informasi Kementerian Keuangan



✉ kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

 Kementerian Keuangan Republik Indonesia

 Kemenkeuri

 @kemenkeuRI

 Kemenkeu RI